

PERAN UNHCR DALAM MENANGANI PENGUNGSI SURIAH DI TURKI PADA TAHUN 2011-2023

Aulia Ariyani Savitri¹ Sonny Sudiar²

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran UNHCR sebagai organisasi internasional dalam merespons krisis pengungsi Suriah di Turki. Fokus penelitian mencakup bagaimana UNHCR menjalankan perannya dalam perlindungan dan pemenuhan hak asasi pengungsi serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui studi pustaka, analisis dokumen, dan observasi tidak langsung terhadap laporan resmi UNHCR, kebijakan pemerintah Turki, dan literatur akademik. Landasan teorinya menggunakan teori Organisasi Internasional dari Clive Archer yang membagi peran organisasi menjadi instrumen, aktor, dan arena, serta konsep Human Security yang menekankan perlindungan manusia secara holistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UNHCR berperan penting dalam perlindungan hukum, kebutuhan dasar, dan solusi jangka panjang, meski menghadapi keterbatasan dalam integrasi sosial dan koordinasi repatriasi dengan pemerintah Turki.

Kata Kunci: UNHCR, Pengungsi Suriah, Turki, Organisasi Internasional, *Human Security*.

Abstract

This study analyzes the role of UNHCR as an international organization in responding to the Syrian refugee crisis in Turkey. It focuses on how UNHCR fulfills its role in protecting and upholding refugee rights, as well as the challenges encountered in its implementation. Using a descriptive qualitative method, data were collected through literature review, document analysis, and indirect observation of official UNHCR reports, Turkish government policies, and academic sources. The research applies Clive Archer's theory of international organizations—classifying their roles as instruments, actors, and arenas—and the Human Security concept, which emphasizes holistic protection of individuals. The findings reveal that UNHCR plays a crucial role in legal protection, basic needs provision, and long-term solutions, though challenges remain in social integration and repatriation coordination with the Turkish government.

Keywords: UNHCR, Syrian Refugees, Turkey, International Organization, *Human Security*.

1. PENDAHULUAN

Dalam konteks studi hubungan internasional, krisis kemanusiaan (*humanitarian crisis*) dipahami sebagai suatu kondisi darurat yang mengancam kelangsungan hidup, keamanan, dan kesejahteraan populasi dalam skala besar, serta seringkali memerlukan respons lintas negara dan keterlibatan lembaga multilateral (*Humanitarian Coalition*, 2024). Salah satu konsekuensi nyata dari kompleksitas krisis

ini adalah munculnya populasi pengungsi individu atau kelompok yang terpaksa mengungsi dari wilayah asal mereka.

Setelah lebih dari satu dekade konflik, Suriah tetap menjadi salah satu krisis pengungsi terbesar di dunia menurut *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR). Konflik *Arab Springs* di Suriah diawali dengan penangkapan 15 pelajar yang berusia 9-15 tahun di kota Deraa pada Maret 2011. Gelombang protes dan demonstrasi yang awalnya bersifat sporadis kemudian mengalami eskalasi menjadi konflik internal bersenjata, yang pada akhirnya berkembang menjadi perang sipil berskala besar.

Eskalasi konflik terus meningkat dan mendorong warga sipil Suriah mencari suaka ke negara – negara perbatasan, dan Turki menjadi salah satu negara tujuan pengungsian dengan jumlah terbesar. Kebijakan terbuka yang diadopsi oleh Pemerintah Turki dalam menerima pengungsi, terutama dari Suriah, didasarkan pada pertimbangan kemanusiaan serta kerangka hukum nasional yang mendasari perlindungan terhadap populasi rentan (Roynanda, 2019). Masuknya pengungsi Suriah ke Turki sejak akhir April 2011 di Provinsi Hatay, yang terletak berdekatan dengan Suriah, mencatatkan setidaknya ada sekitar 250 jiwa pengungsi. Pada bulan Juni 2011, jumlah pengungsi Suriah yang telah tiba di Turki meningkat menjadi sekitar 7.000 jiwa. Kemudian, pada Desember 2011, setidaknya ada 8.000 jiwa yang terdaftar (Anwar, 2022).

Seiring dengan konflik yang masih berada dalam tahap eskalasi awal. Pada tahun 2012 meningkat menjadi sekitar 180.000 orang, dan terus bertambah hingga mencapai sekitar 600.000 pengungsi pada tahun 2013. dramatis pada tahun 2014, dengan total pengungsi yang diterima Turki mencapai 1,6 juta jiwa. Puncaknya, pada tahun 2015, jumlah mencapai kurang lebih 2,5 juta orang mayoritas berasal dari Suriah (UNHCR, 2019). Kemudian pada 2020 setidaknya ada 3,65 juta jiwa pengungsi di Turki. Pada 2021 3,7 juta jiwa dan mengalami peningkatan 5% pada tahun 2022 yaitu 191.600 (Databoks,2023). Pada tahun 2023, berkisaran kembali di angka 3,7 juta jiwa dan di tahun 2024 jumlah pengungsi menurun hingga 3.300.000 jiwa (Muhammad, 2023).

Menurut laporan UNHCR pada tahun 2023, jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya seperti Iran, Jerman, Kolombia dan Pakistan, Turki merupakan salah

satu negara dengan jumlah populasi pengungsi terbesar di dunia, dimana Iran menampung sekitar 3,4 juta pengungsi Afghanistan, Turki menampung sekitar 3,4 juta pengungsi asal Suriah, Jerman sekitar 2,5 juta pengungsi yang mayoritas berasal dari Timur Tengah dan Ukraina, dan Kolombia menerima sekitar 2,9 juta pengungsi dari Venezuela dan Pakistan sekitar 2,1 juta pengungsi Afghanistan (Mustaqim, H Andika, 2023).

Turki menjadi negara dengan jumlah populasi pengungsi terbesar di dunia dan menjadikannya aktor kunci dalam lanskap kemanusiaan global. Fakta ini menunjukkan tantangan besar yang dihadapi Turki dalam mengelola integrasi sosial, penyediaan layanan dasar, serta stabilitas sosial dan ekonomi di tengah tekanan demografis yang terus meningkat. Adanya permasalahan layanan kesehatan yang dirasakan pengungsi Suriah, hambatan untuk mengakses layanan kesehatan, biaya dan keterbatasan sumber daya yang tersedia (Hoke, 2016). Tidak hanya itu kondisi kamp atau tempat tinggal yang buruk, masalah air bersih, pekerjaan bagi pengungsi yang tidak stabil, serta diskriminasi yang dialami oleh pengungsi Suriah (Hoke, 2016) turut menjadi permasalahan yang perlu ditangani.

Menyikapi situasi ini, diperlukan keterlibatan sebuah organisasi internasional untuk menangani pengungsi asal Suriah. Sebagai organisasi internasional yang memiliki mandat utama dalam menangani pengungsi dan pencari suaka, UNHCR bertanggung jawab dalam hal perlindungan hukum dan fisik, memiliki kewajiban untuk menyediakan tempat tinggal yang layak dan menginisiasi program-program yang mendukung kelangsungan hidup mereka. Dengan fokus utamanya adalah menjamin perlindungan hak asasi dan kesejahteraan para pengungsi (*United Nations*, 2013). Landasan hukum utama bagi kinerja UNHCR adalah Konvensi Pengungsi tahun 1951, yang menetapkan prinsip *non-refoulement* bahwa pengungsi tidak boleh dipulangkan ke negara asal mereka apabila di sana terdapat ancaman nyata terhadap keselamatan jiwa dan kebebasan mereka. Prinsip ini kemudian menjadi pilar dalam sistem hukum internasional mengenai perlindungan pengungsi (Paryati, 2016).

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan dan menguraikan berbagai peran yang dilakukan oleh UNHCR dalam menangani pengungsi Suriah di Turki pada periode 2011–2023. Data yang digunakan

dalam penelitian ini bersifat sekunder, berupa dokumen, jurnal, buku, situs web, artikel, serta berbagai media lain yang relevan dan memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

3. PERAN UNHCR DALAM MENANGANI PENGUNGSI SURIAH DI TURKI PADA TAHUN 2011-2023

Konflik ini dipicu oleh serangkaian gerakan sosial yang dilakukan oleh masyarakat di berbagai negara Timur Tengah sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap rezim otoriter yang berkuasa. Gerakan protes besar di kawasan Timur Tengah bermula dari tindakan bakar diri seorang pemuda Tunisia bernama Mohamed Bouazizi. Aksi ini merupakan bentuk perlawanan terhadap ketimpangan sosial, korupsi aparat keamanan, dan minimnya akses layanan kesehatan di Tunisia. Tindakan Bouazizi menjadi pemicu munculnya Revolusi Melati yang kemudian menyebar ke negara-negara lain seperti Aljazair, Yordania, Yaman, dan Mesir, serta menginspirasi gelombang protes di seluruh kawasan Timur Tengah.

Pada bulan Juli 2011, rangkaian protes yang semakin meluas di kawasan Timur Tengah membawa dampak signifikan terhadap perubahan kepemimpinan di beberapa negara. Situasi ini kemudian memicu konflik berkepanjangan di Suriah. Selain itu, ketegangan juga diperparah oleh faktor perbedaan etnis dan agama. Ironisnya, kelompok Sunni yang merupakan mayoritas justru mengalami diskriminasi melalui kebijakan rezim Bashar al-Assad, salah satunya dengan pengurangan subsidi, sementara kelompok Alawite sebagai minoritas justru memegang dominasi kekuasaan politik di negara tersebut (Hassan, 2014).

Ketidakstabilan yang ekstrim ini mendorong jutaan penduduk Suriah untuk mencari suaka di luar negeri, mengingat tidak adanya zona aman (*safe zone*) maupun wilayah larangan terbang (*non-fly zone*). Sejak konflik meletus pada tahun 2011, lebih dari dua juta warga Suriah telah meninggalkan negaranya untuk mencari perlindungan (UNHCR, 2014, p. 4). Negara-negara yang menjadi tujuan utama pengungsi adalah Yordania di selatan, Lebanon di barat, Mesir melalui jalur laut, serta Turki dan beberapa negara anggota Uni Eropa di utara (Syarifudin, 2024). Sebagai negara dan kawasan yang telah meratifikasi *Konvensi 1951* dan *Protokol 1967* mengenai status pengungsi, Turki dan Uni Eropa bertanggung jawab memberikan perlindungan

kepada para pengungsi. Turki dalam hal ini menerapkan kebijakan *Open Door Policy* (Dora, Z, 2020).

Permasalahan yang Dihadapi Pengungsi Suriah

Isu Penyediaan Tempat Tinggal Layak bagi Pengungsi, Akibat dari lonjakan pengungsi Suriah yang meningkat, banyak dari para pengungsi yang terpaksa menetap di daerah perbatasan sebagai tempat tinggal akibat keadaan kamp pengungsian yang penuh. Awalnya pemerintah Turki membangun 21 kamp dengan kondisi relatif aman. namun dengan semakin meningkatnya jumlah pengungsi setiap tahunnya, mengakibatkan fasilitas-fasilitas tersebut menjadi sangat terbatas dan tidak memadai. Akhirnya banyak pengungsi yang tidak mendapatkan akses tersebut memutuskan untuk keluar kamp dan masuk ke daerah perkotaan. Namun kenyataannya kondisi pengungsi Suriah yang memutuskan masuk ke daerah perkotaan Turki semakin memburuk yang akhirnya menyebabkan kemiskinan dan beban sosial yang lebih besar pada masyarakat lokal serta pemerintah, dan juga dapat menyebabkan terjadinya ketegangan sosial yang akhirnya dapat mengakibatkan terhambatnya proses integrasi sosial dan ekonomi

Banyak pengungsi Suriah di Turki bekerja secara tidak resmi di sektor tekstil, pertanian, dan konstruksi, termasuk anak-anak usia sekolah. Akibatnya, mereka tidak memperoleh jaminan sosial dan sering menerima upah di bawah standar. Situasi ini diperparah oleh inflasi sejak 2019 yang meningkatkan biaya hidup, sementara pengungsi perempuan menghadapi risiko pelecehan seksual untuk mempertahankan pekerjaan mereka. Pada tahun 2020, UNHCR menyatakan bahwa pandemi COVID-19 menyebabkan kemerosotan ekonomi di banyak negara penerima suaka, termasuk Turki (VOA, 2020). Akibatnya, banyak pengungsi hidup di bawah garis kemiskinan dan harus bersaing dengan penduduk lokal untuk pekerjaan berupah rendah (VOA, 2020).

Pada periode 2014–2015, hanya sekitar 13% dari 708.000 anak pengungsi Suriah usia sekolah di 25 kamp yang mendapatkan akses pendidikan (Makovsky, 2019). Di luar kamp, angka partisipasi sekolah sedikit lebih tinggi, yaitu sekitar 25%. Banyak anak pengungsi tidak dapat menikmati pendidikan gratis sehingga terpaksa bekerja untuk membantu perekonomian keluarga atau memenuhi kebutuhan sendiri. Hambatan bahasa, kesulitan beradaptasi sosial, serta tekanan ekonomi

memperparah keadaan (Makovsky, 2019). Selain itu, ketakutan terhadap diskriminasi dan ketegangan dengan anak-anak Turki juga menjadi faktor penghalang. Anak-anak pengungsi kerap kesulitan memperoleh tempat di sekolah negeri yang penuh, menghadapi kendala bahasa pengantar, dan tidak memiliki biaya transportasi. Akibatnya, sebagian keluarga akhirnya melibatkan anak-anak mereka dalam pekerjaan demi mencukupi kebutuhan hidup.

Isu kesehatan juga menjadi salah satu penyebab utama krisis kemanusiaan yang dialami pengungsi Suriah di Turki. Kondisi sanitasi yang buruk, keterbatasan air bersih, serta lingkungan kamp yang tidak higienis memperburuk situasi. Bencana alam seperti gempa bumi pada 6 Februari 2023 turut memperparah keadaan, di mana sekitar 1,75 juta pengungsi Suriah di wilayah selatan Turki—terutama di Gaziantep, Antakya, Şanlıurfa, dan Adana—terdampak langsung (VOA, 2023).

Penyakit menular juga menjadi permasalahan serius, dengan meningkatnya kasus COVID-19, leishmaniasis akibat lalat pasir, hepatitis A, TBC, malaria, dan cacar (Department of History of Medicine and Ethics, 2018). Selain itu, aspek kesehatan mental pengungsi, khususnya anak-anak, juga sangat terdampak. Banyak di antara mereka mengalami PTSD dan depresi berat akibat trauma konflik (HUGO, 2014).

Isu xenophobia juga menjadi salah satu masalah besar yang dihadapi pengungsi Suriah di Turki. Xenophobia berarti rasa takut atau tidak suka yang berlebihan terhadap orang asing (Bayu, 2021). Banyak warga Turki menganggap pengungsi Suriah sebagai ancaman, karena dianggap merebut pekerjaan, meningkatkan kriminalitas, dan lebih diperhatikan oleh pemerintah. Akibatnya, muncul pandangan negatif bahwa pengungsi Suriah adalah pencuri atau penjahat. Masalah bahasa juga memperburuk keadaan. Contohnya, jurnalis Al Jazeera bernama Rokaya Celik diserang di Istanbul hanya karena berbicara dalam bahasa Arab (Hanoum, 2023). Pengungsi juga sering disalahkan atas inflasi dan turunnya nilai mata uang Lira.

Setelah gempa besar pada Februari 2023, kebencian terhadap pengungsi semakin meningkat. Banyak warga menuduh pengungsi melakukan penjarahan. Di beberapa tempat, pengungsi bahkan diusir dari kamp darurat. Tindakan diskriminatif juga terjadi di Hatay pada 2017, ketika polisi mencabut papan berbahasa Arab di toko milik pengungsi (Hanoum, 2023). Beberapa pengungsi juga menjadi korban

kekerasan verbal dan fisik (HUGO, 2014). Semua ini menunjukkan bahwa xenophobia masih menjadi masalah serius di Turki dan membuat pengungsi Suriah hidup dalam ketakutan serta kesulitan berintegrasi dengan masyarakat lokal.

Perubahan Kebijakan Turki Terhadap Pengungsi

Pemerintah Turki di bawah kepemimpinan Erdogan menyesuaikan kebijakan pengungsi sesuai kondisi di lapangan. Sejak 2019, Turki mulai mengubah kebijakan dari open door policy yang terbuka bagi pengungsi Suriah (sejak 2011) menjadi kebijakan repatriasi, yaitu memulangkan pengungsi ke wilayah yang dianggap aman.

Untuk memastikan kebijakan ini sesuai dengan hukum internasional, Turki bekerja sama dengan organisasi kemanusiaan dan komunitas global (Voluntas, 2019). Perubahan ini terjadi karena jumlah pengungsi Suriah terus meningkat setiap tahun, yang membebani ekonomi dan kapasitas negara (Anissa, 2021). Meski konflik di Suriah belum berakhir, sejak 2019 pemerintah Turki tetap melanjutkan pemulangan pengungsi, terutama bagi mereka yang tidak memiliki dokumen atau izin tinggal resmi.

Perubahan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Turki dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling berkaitan:

a. Faktor Sosial

Kehadiran pengungsi Suriah di Turki menimbulkan banyak masalah sosial dan ekonomi. Banyak warga lokal merasa tersaingi karena pengungsi mau bekerja dengan upah lebih rendah. Akibatnya, angka pengangguran naik hingga 13,7% pada tahun 2019 (Ahmad, 2019). Meski pemerintah memberi izin bagi pengungsi untuk bekerja di beberapa sektor, mereka tetap kesulitan karena hambatan bahasa, status hukum, dan diskriminasi (Dora, 2020). Kebanyakan pengungsi bekerja di sektor informal seperti pertanian dan konstruksi dengan upah kecil. Hal ini memicu kecemburuan dan ketegangan sosial. Layanan publik juga ikut terdampak. Sekolah, rumah sakit, dan perumahan menjadi padat, sementara harga sewa meningkat. Perbedaan budaya dan jumlah pengungsi yang besar membuat proses integrasi sulit, sehingga pemerintah mulai menerapkan kebijakan pemulangan (repatriasi) untuk menjaga stabilitas sosial.

b. Faktor Ekonomi

Ekonomi menjadi alasan penting perubahan kebijakan Turki terhadap pengungsi Suriah. Jumlah pengungsi yang mencapai sekitar 3,6 juta orang membuat Turki harus mengeluarkan biaya besar, sekitar USD 10 miliar untuk kamp, kesehatan, dan pendidikan (Sicak & Caliskan, 2019; Tsarouhas, 2023). Namun, ekonomi Turki memburuk. Inflasi naik hingga 83,5% pada 2022, harga barang meningkat, dan daya beli masyarakat menurun (CNBC, 2022). Pemerintah pun mulai meninjau ulang kebijakan pengungsi karena beban keuangan yang berat. Selain itu, perdagangan Turki dengan Suriah menurun dan nilai tukar lira jatuh hingga 40%. Hingga 2019, total biaya penanganan pengungsi mencapai USD 40 miliar (Ulfah, 2022). Bantuan dari Uni Eropa sebesar €6 miliar belum cukup membantu. Banyak warga lokal merasa tersisih karena pemerintah lebih fokus pada pengungsi. Tekanan ekonomi dan sosial ini akhirnya membuat pemerintah Turki memilih untuk memulangkan sebagian pengungsi (Kirişci, 2021).

Tekanan yang besar membuat pemerintah Turki mengubah kebijakannya dengan mendorong repatriasi. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi jumlah pengungsi, mengurangi beban negara, dan menjaga keseimbangan antara kepentingan kemanusiaan dan nasional.

Peran UNHCR Dalam Menangani Pengungsi Suriah di Turki

A. Peran Sebagai Aktor

UNHCR memiliki dua tugas utama dalam melindungi pengungsi Suriah di Turki. Pertama, memberikan perlindungan dan keamanan agar para pengungsi dapat hidup dengan aman dan damai. Kedua, menyalurkan bantuan kemanusiaan seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, air bersih, layanan kesehatan, dan pendidikan. Untuk menjalankan tugas ini, UNHCR bekerja sama dengan organisasi internasional seperti UNICEF dan WHO, serta lembaga lokal seperti IHH, Halenski Citizen Assembly-Turkey, ASAM, Anadolu Kültür, HRDF, dan Association for Human Rights and Solidarity for the Oppressed.

Selain itu, UNHCR juga menawarkan tiga solusi jangka panjang bagi pengungsi:

- a. Repatriasi Sukarela – Pemulangan pengungsi ke Suriah secara sukarela jika kondisi sudah aman, dengan jaminan keselamatan dan perlindungan hukum.
- b. Integrasi Lokal – Membantu pengungsi yang tidak ingin pulang agar dapat

beradaptasi dan hidup seperti warga lokal melalui pelatihan keterampilan dan pendidikan.

c. Resettlement – Memindahkan pengungsi ke negara ketiga yang bersedia menerima mereka secara permanen agar bisa memulai hidup baru dengan aman.

UNHCR juga menentukan status resmi pengungsi berdasarkan Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967, kemudian menempatkan mereka di kamp perlindungan dan memberikan bantuan sesuai kebutuhan untuk menjamin hak-hak dasar mereka di Turki.

B. Peran Sebagai Arena

a. Konferensi Donor

Konferensi Donor di Kuwait merupakan salah satu upaya UNHCR untuk membantu pengungsi Suriah di Turki. Dalam konferensi ini, dilakukan penggalangan dana dan komitmen dari berbagai negara serta organisasi internasional untuk memberikan bantuan kemanusiaan. Bantuan tersebut mencakup dana, barang, serta dukungan teknis bagi para pengungsi Suriah di Turki. Dari konferensi ini, UNHCR juga berperan dalam mengoordinasikan lembaga dan negara pemberi bantuan agar bantuan dapat disalurkan secara efektif dan efisien kepada pengungsi Suriah yang membutuhkan. Selain itu, konferensi ini juga membahas solusi jangka panjang untuk membantu proses perdamaian, negosiasi politik, dan upaya diplomatik guna mengakhiri konflik secara damai.

b. Konferensi Tingkat Tinggi PBB di Jenewa

Pada tahun 2014, UNHCR melakukan beberapa konferensi internasional untuk memberikan bantuan kepada Suriah, salah satunya adalah melakukan Konferensi Tingkat Tinggi PBB di Jenewa untuk membantu pengungsi Suriah. Konferensi ini sendiri dilakukan berdasarkan salah satu fungsi dari Organisasi Internasional yaitu untuk memberikan sarana komunikasi agar dapat menampung gagasan-gagasan bantuan. Konferensi ini sendiri bertujuan untuk mengumpulkan dana tambahan untuk para pengungsi Suriah, termasuk pengungsi yang berada di Turki, serta untuk mengupayakan pembangunan dan bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi Suriah di Turki.

C. Peran Sebagai Instrumen

a. Pelaksanaan kerjasama UNHCR dan NGO Lokal

UNHCR bekerja sama dengan NGO lokal untuk menyediakan fasilitas di kamp-kamp pengungsian di Turki, termasuk tenda, sandang, pangan, dan program pemberdayaan pengungsi. Pada tahun 2015, UNHCR bersama AFAD dan pemerintah Turki membangun 25 kamp di 10 wilayah. UNHCR juga meningkatkan keamanan individu dengan meluncurkan aplikasi *Service Advisor* agar pengungsi mudah mengakses informasi bantuan. Selain itu, UNHCR menyalurkan 20.000 selimut, 10.000 tikar, 5.000 jerigen, dan 2.000 lembar plastik, serta mengoordinasikan pendaftaran bergerak dan enam pos perbatasan untuk memantau pengungsi yang datang. Melalui kerja sama ini, UNHCR berupaya memenuhi prinsip keamanan manusia dengan meningkatkan kesejahteraan pengungsi Suriah di Turki.

b. Pelaksanaan Kerjasama UNHCR dengan UNICEF

Dalam membantu pendidikan pengungsi Suriah di Turki, UNHCR bekerja sama dengan UNICEF untuk mempermudah pendaftaran sekolah umum dan menyediakan program belajar bahasa Turki agar anak-anak lebih mudah beradaptasi. UNHCR juga memastikan anak-anak Suriah mendapat pendidikan layak dan melindungi mereka dari kerja anak (Brown, 2015).

Selain itu, UNHCR dan UNICEF mendirikan ruang ramah anak di kamp dan kota, menyediakan dukungan psikososial bagi anak yang mengalami trauma, serta memberikan buku, fasilitas sekolah, dan bantuan keuangan kepada keluarga (Rahsti, 2017). Kerja sama ini juga mencakup pemeriksaan gizi rutin, imunisasi, serta pemberian makanan sehat dan bergizi. Melalui program ini, kedua lembaga berupaya memenuhi hak dasar pengungsi atas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan yang layak.

c. Pelaksanaan Program *Emergency Social Security Net* (ESSN)

Program *Emergency Social Safety Net* (ESSN) adalah program UNHCR yang bertujuan memberikan bantuan keuangan kepada pengungsi Suriah paling rentan di Turki, terutama yang tinggal di luar kamp (ESSN, 2016). Program ini dimulai pada November 2016 hasil kerja sama UNHCR dengan Kementerian Keluarga dan Layanan Sosial Turki, Palang Merah Turki, WFP, dan ECHO Uni Eropa. Bantuan diberikan melalui kartu debit untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan dan tempat tinggal. Pada 2022, sekitar 1,5 juta pengungsi Suriah menerima bantuan ini.

Hingga April 2020, tercatat 1.846.469 individu dan 326.674 rumah tangga telah menerima bantuan dengan total 4,36 miliar (ESSN, 2021). Program ini penting karena banyak pengungsi bekerja di sektor informal dengan upah rendah dan tanpa perlindungan hukum. Melalui ESSN, UNHCR membantu mengurangi ketergantungan pada pekerjaan informal dan menekan xenophobia, serta menjamin hak, kesempatan, dan kesejahteraan pengungsi Suriah di Turki sesuai konsep keamanan manusia.

Meskipun UNHCR telah berupaya memenuhi kebutuhan pokok pengungsi Suriah seperti makanan, tempat tinggal, dan layanan kesehatan, masih banyak pengungsi yang kekurangan akses terhadap hal-hal tersebut. Dari sekitar 3,6 juta pengungsi, tidak semuanya mendapatkan layanan memadai. Banyak yang masih menghadapi diskriminasi, stigma sosial, dan kesulitan akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta pekerjaan akibat status hukum mereka sebagai pengungsi.

UNHCR menjalankan fungsinya sebagai instrumen PBB berdasarkan *1951 Refugee Convention* dan *1967 Protocol* untuk memastikan hak-hak pengungsi terlindungi. Organisasi ini juga menegakkan prinsip *non-refoulement*, menyediakan fasilitas dasar, dan berperan langsung di lapangan dengan membangun kamp pengungsi, menyediakan layanan medis, pendidikan gratis, serta bekerja sama dengan pemerintah Turki dan lembaga lain dalam program pemukiman kembali dan dukungan ekonomi.

Selain itu, UNHCR menjadi penghubung antara berbagai aktor internasional seperti Uni Eropa, Turki, dan negara donor dalam pendanaan dan distribusi bantuan. Organisasi ini juga memastikan proses repatriasi pengungsi bersifat sukarela, aman, dan bermartabat.

Dalam pendekatan *human security*, UNHCR menempatkan perlindungan individu sebagai pusat perhatian. Hal ini mencakup perlindungan dari pengusiran paksa, penyediaan tempat tinggal layak, dan peningkatan kesejahteraan ekonomi melalui pelatihan keterampilan serta dukungan usaha. UNHCR juga mendorong integrasi sosial antara pengungsi dan masyarakat lokal serta menjamin perlindungan hukum dan status tinggal resmi. Melalui peran kemanusiaan, koordinatif, dan advokatifnya, UNHCR berperan penting dalam menjaga keamanan, martabat, dan stabilitas pengungsi Suriah di Turki.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini membahas meningkatnya jumlah pengungsi Suriah ke Turki akibat konflik berkepanjangan di Suriah yang dipicu oleh Arab Spring dan ketegangan di bawah rezim Bashar al-Assad. Situasi ini menimbulkan tantangan besar dalam aspek kemanusiaan, sosial, dan ekonomi bagi pengungsi maupun bagi Turki sebagai negara penerima. Dalam hal ini, UNHCR berperan penting sebagai organisasi internasional yang bertanggung jawab atas perlindungan pengungsi, mencakup keamanan, tempat tinggal, layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UNHCR berfungsi sebagai instrumen negara anggota dalam mandat kemanusiaannya, sebagai aktor independen yang aktif berkoordinasi dengan pemerintah Turki dan mitra internasional, serta sebagai arena kerja sama multilateral melalui kebijakan seperti *EU-Turkey Statement*. Pendekatan *human security* juga tercermin dalam strategi UNHCR yang berfokus pada perlindungan individu dan keberlanjutan hidup pengungsi. Namun, tantangan integrasi sosial, beban ekonomi, serta dinamika politik domestik dan internasional masih menghambat perlindungan optimal bagi pengungsi Suriah di Turki.

REFERENSI/DAFTAR PUSTAKA [Arial 12 dicetak tebal]

- Archer, Clive. 2001. *International Organization*. Amerika Serikat dan Kanada: Taylor & Francis e-Library
- Aini, Nur. 2021. "Turki Tampung Lebih dari 3,6 Juta Pengungsi Suriah". 2021. Republika.co.id. Tersedia di <https://republika.co.id/amp/qqv6r187252840>
- Andi Niniek Paryati. 2016. "United Nations High Commissioner For Refugees (UNHCR) Dan International Organization For Migration (IOM) Dalam Menangani Masalah Pengungsi di Makassar". Universitas Hasanudin.
- Andhika, Bayu Trimulya. 2019. "Intervensi Amerika Serikat di Suriah (United State of America Intervention in Syria)". Universitas Jember
- Anwar, Laraswati Ariadne. 2020. "Pengungsi Suriah di Tengah Pusaran Politik Turki". Kompas.id. Tersedia di <https://www.kompas.id/baca/internasional/2022/05/12/pengungsi-suriah-di-tengah-pusaran-politik-turki>
- Department of History of Medicine and Ethics, T. U. 2018. Syrian Refugees, Health and Migrations Legislations in Turkey. HSS Public Access.
- Dora, Z. 2020. "*International Migrants As A Matter Of Security: Open Door Policy and Syrians in Turkey.*" *Güvenlik Bilimleri Dergisi* 9(2):501–24. doi: 10.28956/gbd.830065.
- Hanoum. 2023. "Sentimen Anti-Pengungsi Suriah Meningkat, Polisi Turki Hapus Simbol dan Tulisan Arab", dari <https://www.arrymah.id/sentimen-anti-pengungsi-suriah-meningkat-polisi-turki-hapus-simbol-dan-tulisan-arab/>

- Hassan, A. 2014, Desember 17. "A Fruit Vendor Whose Death Led to a Revolution." Dipetik November 27, 2017, dari nytimes.com: <https://www.nytimes.com/2014/12/16/us/arabspring-a-fruit-vendor-who-started-a-revolution.html>
- Humanitarian Coalition. "WHAT IS A HUMANITARIAN EMERGENCY?". Tersedia di <https://www.humanitariancoalition.ca/what-is-a-humanitarian-emergency>
- IFRC, 2016. "About The Programme". Ifrc.org. Tersedia di ifrc.org/our-work/disasters-climate-and-crises/cash-and-voucher-assistance/emergency-social-safety-net-essn
- IFRC, 2021. "Emergency Social Security Net (ESSC)". Ifrc.org. Tersedia di ifrc.org/sites/default/files/2022-02/ESSN_Monthly_Report_June_2021.pdf
- Kemal, Kirişci. 2021. "As EU-Turkey Migration Agreement Reaches the Five-Year Mark, Add a Job Creation Element". Brookings <https://www.brookings.edu/articles/as-eu-turkey-migration-agreementreaches-the-five-year-mark-add-a-job-creation-element/>
- Muhammad Dary Suryantama. "Turkey's Open-Door Policy for Syrian Refugees: Humanity Motive and Political Motive". UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 28 Desember 2021, hlm. 66-70. Jakarta.
- Makovsky Alan. 2019. "Turkey's Refugee Dilemma Tiptoeing Toward Integration". Center for American Progress. <https://www.americanprogress.org/article/turkeys-refugee-dilemma-tiptoeing-toward-integration/>
- Mustaqim H Andika. 2023. "10 Negara dengan Penduduk Berstatus Pengungsi Terbanyak, Nomor 7 Negara Eropa Paling Dermawan". retrieved from <https://international.sindonews.com/read/1125143/45/10-negara-dengan-penduduk-berstatus-pengungsi-terbanyak-nomor-7-negara-eropa-paling-dermawan-1686625617/12>
- Roytanda, Novrizal. 2019. "Kebijakan Uni Eropa Terhadap Krisis Pengungsi: Analisis Sekuritisasi dalam Pembentukan EU-Turkey Statement." Skripsi, UII, retrieved from <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/14225?show=full>
- Sari, R. S. (2018). Peran United Nation High Commissioner For Refugee (UNHCR) dalam menangani pengungsi Suriah di Turki Tahun 2013-2016. E Journal Ilmu Hubungan Internasional, Volume 6, 832
- Tentang UNHCR – Sejarah UNHCR. Tersedia di <https://www.unhcr.org/history-of-unhcr.html>
- Ulfah, Nidah Kholidia. 2022. "Faktor-Faktor Kegagalan Kerjasama European Union (EU) dan Turki dalam Menangani Krisis Pengungsi di Benua Eropa." Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK), 4(6):7698– 7707. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.9574>

United Nation Development Programme (UNDP). 1994. *Human Development Report 1994*. New York: Oxford University Press.

United Nations High Commissioner Refugees. "Pengungsi". unhcr.org. Dapat diakses di <https://www.unhcr.org/id/pengungsi>

United Nations High Commissioner Refugees. 13 Maret 2025 "*Syria Refugee Crisis Explained*." Tersedia di <https://www.unrefugees.org/news/syria-refugee-crisis-explained/#WhendidtheSyrianrefugeecrisisbegin?>

United Nations High Commissioner Refugees. Forced Displacement in 2019. unhcr.org. Dapat diakses di <https://www.unhcr.org/flagship-reports/globaltrends/globaltrends2019/>

VOA. 2023. "[Korban Tewas Gempa Turki dan Suriah Lampau 41 Ribu](https://www.voaindonesia.com/a/korban-tewas-gempa-turki-dan-suriah-lampau-40-000/6963847.html)". Tersedia di <https://www.voaindonesia.com/a/korban-tewas-gempa-turki-dan-suriah-lampau-40-000/6963847.html>

Voluntas. 2019. "*State of the Syria Crisis Response: Assessing Humanitarian and Development Challenges*."

Zlatica, Hoke. "Para Pengungsi Suriah di Perbatasan Turki Kurang Kebutuhan Pokok". Voaindonesia.com. Tersedia di <https://www.voaindonesia.com/a/para-pengungsi-suriah-di-perbatasan-turki-kurang-kebutuhan-pokok/3188124.html>.